

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA UTARA

Depiska Tritanti Simamora¹, Lasenna Siallagan², Asril Rouli Nilawati Pasaribu³, Tesa Arizky Simanjuntak⁴, Josua Vatrack Tarigan⁵, Sherly Dwira Simorangkir⁶
depiskat@gmail.com¹, siallaganlasenna@unimed.ac.id², asrilrouli109@gmail.com³,
tesaarizkysimanjuntak@gmail.com⁴, josuavatrack03@gmail.com⁵, shelydwira@gmail.com⁶

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi ekonomi dapat menimbulkan permasalahan baru, antara lain meningkatnya kesenjangan kesejahteraan dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penurunan pendapatan Sumut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data cross-sectional dari tiga kabupaten dan kota di Sumatera Utara serta data time series tahun 2017 hingga 2021. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik fixed effect model dan analisis data panel. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,0478, penelitian ini menemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan nilai probabilitas sebesar 0.2890 maka variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan pendapatan secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia pada saat yang bersamaan. Kedua faktor ini menyumbang 73,53% dari total, dengan faktor tambahan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini menjelaskan sisanya.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

The existence of inequality in income distribution will give rise to new problems such as unequal access to education for less fortunate people and can also result in widening the income gap between rich and poor people. This research is intended to look at the influence of the human development index and economic growth on income inequality in North Sumatra. The data used in this research is secondary data with time series data for the period 2017-2021 and cross sections of 3 districts/cities in North Sumatra. This research is quantitative research using panel data analysis methods with a fixed effect model approach. From the research conducted, it was obtained that the Human Development Index variable had a negative and significant effect on Income Inequality with a probability value of 0.0478. The Economic Growth variable has a positive and insignificant effect on Income Inequality with a probability value of 0.2890. Simultaneously the Human Development Index and Economic Growth have a significant effect on income inequality and the two variables studied have a contribution of 73.53% and the remainder is explained by other variables outside this research.

Keywords: Income Inequality, Human Development Index, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan ini dapat diukur melalui berbagai indikator seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah di berbagai belahan dunia terus berupaya mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Namun, pencapaian tujuan tersebut seringkali menghadapi tantangan, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, serta disparitas kesejahteraan antara kelompok sosial. Oleh

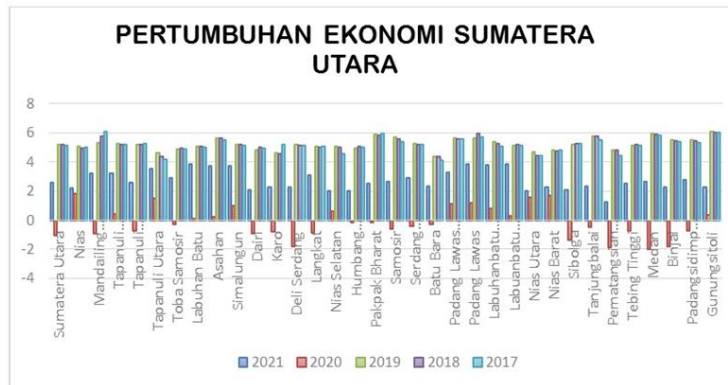
karena itu, pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penting sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana suatu negara berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penguatan IPM menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah situasi di mana pendapatan nasional tidak tersebar secara merata di antara masyarakat Todaro (2011). Adanya Ketimpangan Distribusi pendapatan dapat menyebabkan permasalahan seperti kesulitan akses pendidikan bagi individu dengan sumber daya terbatas dan meningkatnya jurang pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketimpangan bukan tentang kekayaan saja, melainkan juga kesempatan terhadap aspek pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah dapat dengan melihat koefisien gini (gini ratio). Apabila nilai Indeks Gini mencapai 0 (nol) itu mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan sangat merata atau "kemerataan sempurna". Di sisi lain, jika nilai Indeks Gini mencapai 1 (satu), hal itu menunjukkan adanya "ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna". Intinya, semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam suatu negara tidak merata atau timpang. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Kriteria untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Dikatakan ketimpangan taraf rendah apabila Indeks Gini kurang dari 0,35, sedangkan ketimpangan taraf sedang apabila saat Indeks Gini berada dalam kisaran 0,35 hingga 0,5. Ketimpangan taraf tinggi apabila ketika Indeks Gini melebihi 0,5.

Ketimpangan pendapatan di Sumatera utara bisa dilihat dari angka gini ratio. Dari grafik 1.1 dapat dilihat Ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera utara dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami ketidakstabilan (naik turun) Daerah yang memiliki gini ratio tertinggi di provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2017-2021 adalah kota Medan, kabupaten Gunungsitoli, kabupaten Padang Sidempuan, dan kota Binjai. Dimana di tahun 2021 gini ratio kota Medan mencapai 0.402, kabupaten kabupaten gunung sitoli juga mencapai 0.361 di tahun 2018. Begitu juga dengan kabupaten Padang Sidempuan pernah mencapai 0.359 pada tahun 2018 dan kota binjai mencapai 0.351 pada tahun 2019. Pada tahun 2018 angka gini ratio di Sumatera utara tercatat sebesar 0,3176 dan angka gini ratio tertinggi pada tahun 2018 berada di kabupaten Gunungsitoli angka gini ratio tercatat sebesar 0,3608. Periode selanjutnya angka gini ratio Sumatera utara turun tercatat sebesar 0,3165 pada tahun 2019. kemudian pada tahun 2020 turun tercatat sebesar 0,3161, hingga pada tahun 2021 turun lagi mencapai 0,3145.

Ketimpangan pendapatan diberbagai wilayah bisa berasal dari pertumbuhan dan keterbatasan yang beragam di tiap wilayah, serta kecenderungan pembangunan yang fokus pada daerah-daerah yang telah berkembang. Inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan teradinya ketimpangan dalam suatu daerah, Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pemerataan pembangunan maka daerah yang terbelakang mengalami kemiskinan. Namun apabila pertumbuhan sebanding dengan pemerataan pembangunan ketimpangan tidak akan terjadi (Todaro, Michael P & Smith, 2011: 283).



Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara mengalami fluktuasi, terjadinya naik turun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berdasarkan grafik 1.2 diatas pertumbuhan ekonomi disetiap kab/ kota memiliki perbedaan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah dari Kabupaten Mandailing Natal dimana pada tahun 2017 mencapai 6.09%. Kemudian Kota Medan dimana pada tahun 2019 mencapai 5.93%. Namun Kota Medan juga tercatat memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang terendah di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2020 mencapai -1.98% kemudian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 Laju Pertumbuhan Ekonominya mencapai 4.11%. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi tercatat sebesar -1,07% dibandingkan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 5,22% tahun 2019. Kontraksi yang dialami terjadi karena menurunnya permintaan akibat terbatasnya daya beli masyarakat dan juga ekspor yang melambat. Hal ini karena meningkatnya Covid-19 sehingga masyarakat menahan konsumsi dan cenderung untuk berjaga-jaga ditengan persaingan pada masa pandemic Covid-19. Kontraksi yang tinggi terdapat di Kota Medan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tercatat sebesar -1,98%. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak dapat menangani masalah dari ketidakmerataan pembangunan. Hal ini terjadi karena ada beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Wilayah-wilayah ini tidak mengalami kemajuan yang seragam, dan penyebabnya adalah kekurangan sumber daya yang tersedia.

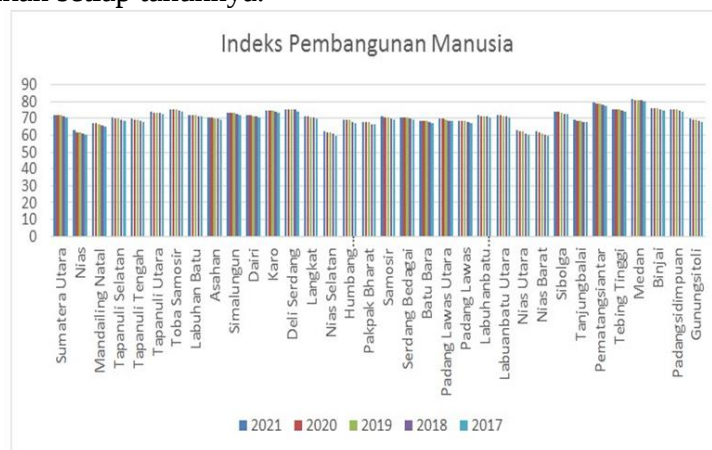
Pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama di kawasan perkotaan yang lebih maju, menyebabkan banyak penduduk yang berusia produktif memilih untuk bersekolah di perkotaan demi mengejar pendidikan. Akibatnya, daerah asal mereka akan mengalami kekurangan penduduk berkualitas, dan ini akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang akan terjadi secara bertahap. Penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam sumber daya yang tersedia dan perkembangan infrastruktur pendidikan yang lebih maju.

Tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat dapat dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Indeks Pembangunan Manusia terbentuk melalui tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, standar hidup layak. Pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan besaran gaji dan memberikan kontribusi yang besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula status pekerjaan yang akan dimiliki. Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia serta memiliki dampak pada produktivitas penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah dan berkontribusi pada upaya pembangunan daerah. Pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin meningkat juga produktivitasnya. Akibatnya, kemungkinan besar mereka akan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi dan menghasilkan hasil kerja yang baik. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dan meminimalisir risiko terperosok ke dalam kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia pada setiap daerah tentu berbeda-beda tergantung dengan bagaimana daerah itu meningkatkan IPM atau sumber daya manusia yang dimiliki di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di setiap daerah itu berbeda juga. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara IPM di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara berbeda-beda namun secara keseluruhan IPM di kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara

2017-2021 Dari grafik 1.3 diperoleh bahwa tingkat IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi. Namun untuk daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan IPM sebesar 81.21 di tahun 2021. Dan untuk yang terendah adalah Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 59,56 pada tahun 2018. Berdasarkan buku BPS 2015 IPM berada di < 60 yang berarti di daerah tersebut memiliki tingkat IPM yang rendah. Hal itu berarti tingkat IPM di Kabupaten Nias Barat tergolong IPM yang rendah. Indeks pembangunan manusia 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ketidakmerataan tingkat IPM menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, ada daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ada pula daerah yang SDM nya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM) maka semakin tinggi pula produktivitas penduduk sehingga pendapatan akan semakin meningkat, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berdampak pada pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Becker (dalam Suryani & Woyanti., 2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

Ada tiga indikator yang menjadi perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan, ketiga faktor ini saling berpengaruh satu sama lain. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah

perlu memperhatikan tiga unsur tersebut. Selain itu, faktor-faktor pendukung lainnya, seperti peluang pekerjaan, sarana infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, juga harus diperhatikan.

Berdasarkan serangkaian masalah yang muncul dari data empiris, teoritis dan fenomena yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Utara”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang dipelajari. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ada, sementara metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis data secara numerik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data pertumbuhan ekonomi, serta rasio Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan. Data tersebut diambil dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2021, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini dianalisis untuk melihat bagaimana perkembangan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan (rasio Gini) di masing-masing daerah selama 4 tahun tersebut, serta bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Pendekatan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Utara ialah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kota Medan ialah ibukota dari provinsi ini. Secara letak astronomis provinsi ini terletak pada 0° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Dari segi letak geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan

Samudera Indonesia di sebelah selatan, serta Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia di sebelah barat.



Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 72.981,23 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 15,3 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 207,40 jiwa/km². Hal ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di

Indonesia.

Sumatera Utara terbagi menjadi delapan kota, 25 kabupaten, 325 kecamatan, dan 5.456 desa atau kelurahan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk

Sumatera Utara mencapai 14,42 juta jiwa secara keseluruhan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7,22 juta wanita dan 7,19 juta pria dalam populasi ini. Medan, ibukota provinsi, menjadi tempat tinggal bagi sekitar 7,21 juta orang, sedangkan yang lainnya tinggal di wilayah pedesaan. Dengan populasi sebanyak 2,26 juta orang, Medan menempati posisi teratas dalam daftar kota paling padat. Sementara itu, Deli Serdang, dengan jumlah penduduk sekitar 2,16 juta orang, berada di peringkat kedua, diikuti oleh Langkat yang memiliki populasi sekitar 1,04 juta warga. Di sisi lain, Pakpak Bharat memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu sekitar 48.000 orang. Pada tahun 2018, Sumatera Utara memiliki sekitar 3,37 juta keluarga dengan ukuran rata-rata keluarga empat. Kepadatan penduduk rata-rata di Sumatera Utara adalah 198 orang per km², tetapi Medan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 8.544 orang per km², menjadikannya kota paling padat di wilayah tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diantaranya ialah:

- Untuk mengetahui pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.
- Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.
- Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu ekonomi yang banyak dihadapi oleh berbagai negara. Ketimpangan ini terjadi ketika distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh kelompok kecil, sementara mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan sosial, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dalam jangka panjang. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi, seperti memperbaiki sistem perpajakan, memberikan akses pendidikan yang merata, dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi semua lapisan masyarakat. (Michael.P. Todaro & Smith, 2006).

Ketimpangan atau ketidaksetaraan pendapatan antara berbagai daerah merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Ketidakterdistribusi pendapatan ini sering terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi di setiap wilayah. Daerah yang lebih maju biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sementara daerah tertinggal sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan pembangunan. Ketimpangan ini tidak hanya memperlebar jurang kesejahteraan antar daerah, tetapi juga dapat memicu migrasi besar-besaran ke kota-kota besar, memperburuk masalah perkotaan seperti kepadatan penduduk dan pengangguran. Untuk mengurangi ketidaksetaraan ini, diperlukan kebijakan yang mendorong pembangunan yang merata, seperti peningkatan investasi infrastruktur di daerah tertinggal, serta dukungan bagi industri lokal dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut. (Sjafrizal, 2012).

Pada dasarnya, distribusi pendapatan adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana pendapatan suatu negara atau wilayah dibagikan di antara individu atau kelompok masyarakat. Konsep ini mencerminkan sejauh mana kekayaan dan sumber daya tersebar secara merata atau tidak merata di dalam populasi. Distribusi pendapatan yang merata menunjukkan bahwa pendapatan dinikmati secara proporsional oleh berbagai kelompok masyarakat, sedangkan distribusi yang tidak merata mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok, sementara sebagian besar lainnya memiliki akses yang terbatas terhadap kekayaan. Kondisi ini sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, serta memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di suatu negara.

Terdapat tiga estimasi model regresi data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect.

1. Model Common

Effect/Pooled Least Square Model Common Effect adalah suatu metode dalam analisis data panel yang menggabungkan data time series dan cross-section dengan menerapkan metode Ordinary Least Square (OLS).

Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regresi yang diberikan adalah konstan untuk setiap objek penelitian dan waktu.

2. Model Fixed Effect

Model regresi dengan efek tetap (fixed effect) adalah salah satu metode sederhana untuk mengidentifikasi perbedaan dalam data. Diasumsikan bahwa meskipun intersep antar individu berbeda, namun slope tetap pada setiap masing-masing individu.

3. Model Random Effect

Model random effect akan mengestimasi data panel di mana gangguan variabel mungkin saling berkaitan antara waktu dan individu. Model random effect dikenal dengan teknik Generalized Least Square (GLS). Random effects digunakan untuk mengatasi ketidakpastian yang muncul dalam model fixed effect karena penggunaan variabel semu, sehingga model dapat mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara pada periode 2017-2021. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017 hingga 2021. Ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas hidup dan pendidikan masyarakat, semakin kecil kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kebijakan yang fokus pada peningkatan IPM sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017 hingga 2021. Ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

secara keseluruhan, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pertumbuhan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak serta merta merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin tetap ada. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, bukan hanya sebagian kecil yang sudah lebih sejahtera.

3. Dari hasil uji yang dilakukan, ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan sebesar 73,53%, sementara sisanya, sebesar 26,47%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain, meskipun kedua faktor ini berkontribusi secara signifikan, masih ada faktor-faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Hal ini menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
4. Berdasarkan hasil pengujian dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, daerah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi ditemukan di Nias Barat, sementara daerah dengan ketimpangan pendapatan terendah terdapat di Medan. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan di antara daerah-daerah tersebut, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, akses terhadap pendidikan, serta ketersediaan layanan dasar. Ketimpangan yang lebih tinggi di Nias Barat dapat mengindikasikan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, sedangkan kondisi yang lebih baik di Medan mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Hal ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah yang lebih tertinggal dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

SARAN

Dari hasil analisis pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari perspektif pemerintah, diperlukan kebijakan yang fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah-daerah dengan ketimpangan pendapatan tinggi, seperti Nias Barat. Pemerintah sebaiknya mengimplementasikan program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Selain itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, seperti investasi infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi lokal, harus diperkuat. Pendekatan berbasis komunitas untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih baik.
2. Untuk peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dapat mencakup analisis kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat setempat mengenai ketimpangan dan akses terhadap layanan

dasar. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemerintah dan perubahan ketimpangan pendapatan di berbagai daerah, serta menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan mendukung upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, lincolin. (2016). Ekonomi Pembangunan (Ke-5). UPP STIM YKPN.
Program Pascasarjana UNDIP, Semarang. Sutomo, 1985. Teknik Penilaian Pendidikan.
Suryanto, Agung, 2000. Pendekatan Konservasi dan Zonasi dalam Tata Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.